

Katalog : 3201033.73



2016

**DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
SULAWESI SELATAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



2016

**DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN
SULAWESI SELATAN**

<http://sulsel.bps.go.id>

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN SULAWESI SELATAN 2016

ISBN: 978-602-6426-37-6

Nomor Publikasi: 73520.1707

Katalog BPS: 3205008.73

Ukuran Buku: 16,5 cm x 22 cm

Jumlah Halaman: x + 28 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN SULAWESI SELATAN 2016

Penanggung Jawab Umum :

Nursam Salam

Penanggung Jawab Teknis :

Faharuddin

Koordinator :

Sukardi M. Nur

Anggota :

Dessy Natalia

<http://sulsel.kps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2016”.

Publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2016” berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2016.

Diharapkan publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2016” dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Makassar, Oktober 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Nursam Salam, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
I Pendahuluan	1
II Metode Penghitungan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota	2
III Konsep dan Definisi	4
IV Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	8
V Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	14

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2012 - Maret 2016	8
4.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016	10
4.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016	12
4.4	Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2016	13
5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P_1 , P_2 , dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015	14
5.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P_1 , P_2 , dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	15
5.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2015	16
5.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2016	17
5.5	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2015	18
5.6	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2016	19
5.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2015	20

5.8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2016	21
5.9	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2015	22
5.10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2016	23
5.11	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2015	24
5.12	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2016	25
5.13	Persentase Perempuan Berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2016	26
5.14	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Miskin, Tahun 2016	27
5.15	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Jumlah (dalam 000) dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016	8
Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016	9
Gambar 4.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016	11

<http://sulsel.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

- Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
- Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

II. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

KONSEP

- BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

SUMBER DATA

- Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2016 adalah Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2016.
- Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/kota tahun 2015 ini menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010.

TEKNIK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN

- Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
- Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.
- GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi.

- GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- Selanjutnya dihitung jumlah penduduk di bawah GK untuk tingkat kabupaten/kota.

INDIKATOR KEMISKINAN

- *Head Count Index* ($HCI-P_0$), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah GK.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan rumusan yang disampaikan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984).

III. KONSEP DAN DEFINISI

PENDIDIKAN

- **Pendidikan yang ditamatkan** adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.
- **Angka melek huruf** adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 dan 15-55 tahun.
- **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah.

KETENAGAKERJAAN

- **Bekerja** adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
- **Bekerja di sektor informal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

- **Bekerja di sektor formal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- **Bekerja di sektor pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi, dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya.
- **Bekerja di sektor bukan pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.
- **Tidak bekerja** adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN

- **Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan** adalah total pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

KESEHATAN

- **Pengguna alat kontrasepsi** adalah perempuan di rumah tangga miskin berumur 15-49 tahun berstatus kawin, cerai hidup, cerai mati, atau pasangannya yang menggunakan alat keluarga berencana (KB) atau cara tradisional guna menunda kehamilan. Alat KB atau cara tradisional meliputi:
 - a. Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW
 - b. Sterilisasi pria/vasektomi/MOP
 - c. IUD/AKDR/spiral
 - d. Suntikan
 - e. Susuk KB/implant

- f. Pil
 - g. Kondom pria/karet KB
 - h. Intravag/kondom wanita/diafragma
 - i. Metode menyusui alami
 - j. Pantang berkala/kalender
 - k. Lainnya
- **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diteteskan dalam mulut dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
 - **Persentase balita yang telah diimunisasi** adalah proporsi penduduk berusia lima tahun ke bawah (balita) di rumah tangga miskin yang setidaknya sudah mendapatkan salah satu dari imunisasi *Bacillus calmette Guerin* (BCG); difteri-pertusis-tetanus (DPT); polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

FASILITAS PERUMAHAN

- **Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:
 - a. Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter.
 - b. Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah < 10 meter/air tidak *sustain* (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.
- **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANAGAN KEMISKINAN

- **Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra)**

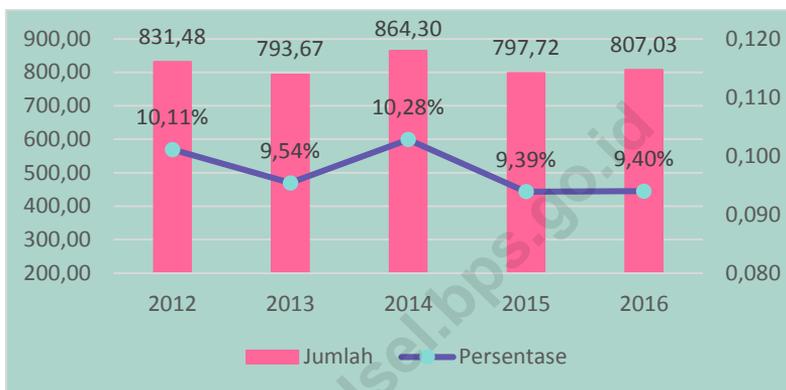
adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

<http://sulsel.bps.go.id>

IV. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

4.1. Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016

Gambar 4.1. Jumlah (dalam 000) dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016



Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan Maret 2016 berjumlah 807.03 ribu atau 9,40 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarkan Gambar 4.1 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin persen atau sebesar 9.31 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2015 dengan nilai pada periode tersebut sebesar 9,39 persen.

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2012 - Maret 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2012	130,08	701,39	831,48	4,31	13,46	10,11
Maret 2013	149,10	644,57	793,67	4,88	12,24	9,54
Maret 2014	162,49	701,81	864,30	5,22	13,25	10,28
Maret 2015	146,42	651,30	797,72	4,61	12,23	9,39
Maret 2016	149,13	657,90	807,03	4,51	12,46	9,40

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pada Maret 2012, penduduk miskin di pedesaan masih mencapai 13,46 persen sementara di daerah perkotaan hanya 4,31 persen. Pada perkembangan selanjutnya pada Maret 2016 penduduk miskin di daerah pedesaan menjadi 12,46 persen sedangkan di perkotaan 4,51 persen.

Secara absolut selama periode Maret 2015 hingga Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan 2.71 ribu jiwa, begitu pula di daerah pedesaan mengalami kenaikan sebesar 6.6 ribu jiwa.

Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada Maret 2016 sebagian besar (81,52 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan, sementara pada Maret 2015 persentasenya 81,65 persen atau mengalami kenaikan.

4.2. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2012 - Maret 2016

Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016



Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Dari hasil pendataan Susenas Maret 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka didapatkan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp

270.601,-. Apabila dilihat dari perkembangannya, Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2016 adalah sebesar 8,94 persen.

Tabel 4.2. Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2012	146 207	64 010	210 217
Maret 2013	154 261	67 632	221 892
Maret 2014	166 639	73 637	240 276
Maret 2015	181 842	80 321	262 163
Maret 2016	193 372	88 304	281 676
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2012	142 075	37 085	179 160
Maret 2013	152 492	39 669	192 161
Maret 2014	166 670	44 601	211 271
Maret 2015	190 563	49 612	240 175
Maret 2016	209 095	54 579	263 674
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2012	143 590	46 956	190 545
Maret 2013	153 141	49 929	203 070
Maret 2014	166 658	55 344	222 003
Maret 2015	187 304	61 087	248 391
Maret 2016	203 918	66 683	270 601

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

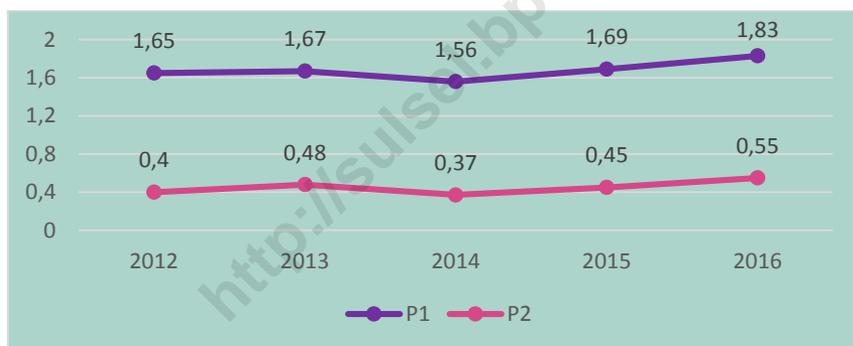
Pada Maret 2015, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,41 persen, hal yang sama terjadi pada Maret 2016 peranannya juga relatif sama namun sedikit mengalami penurunan menjadi 75,36 persen. Peranan GKM terhadap GK untuk daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 69,36 persen dan pada Maret

2016 mengalami penurunan menjadi 68,65 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 79,30 persen cenderung mengalami sedikit penurunan sebesar 0,04 poin persen dari Maret 2015 yang sebesar 79,34 persen.

Pada Maret 2015 untuk daerah perkotaan, sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 30,64 persen dan mengalami kenaikan pada Maret 2016 sebesar 0,71 poin persen. Hal yang sama juga terjadi pada daerah perdesaan, pada Maret 2015 peranannya sebesar 20,66 persen menjadi 20,70 persen pada Maret 2016.

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Gambar 4.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016



Seperti halnya jumlah persentase penduduk miskin yang menunjukkan trend fluktuatif, nilai P_1 dan P_2 juga mengalami hal yang sama namun dengan pola yang berbeda. Gambar 4.3 menunjukkan terjadi kenaikan dari tahun 2015 terhadap tahun 2016. Nilai P_1 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dan nilai P_2 naik sebesar 0,10 poin.

Tabel 4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, Maret 2012 - Maret 2016

Daerah/Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2012	0,67	2,21	1,65
Maret 2013	0,61	2,28	1,67
Maret 2014	0,80	2,01	1,56
Maret 2015	0,66	2,30	1,69
Maret 2016	0,65	2,56	1,83
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2012	0,16	0,53	0,40
Maret 2013	0,14	0,68	0,48
Maret 2014	0,20	0,47	0,37
Maret 2015	0,16	0,63	0,45
Maret 2016	0,12	0,79	0,55

Pada periode Maret 2015 - Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan kecenderungan yang naik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami kenaikan 0,14 poin yaitu dari 1,69 pada keadaan Maret 2015 menjadi 1,83 pada keadaan Maret 2016. Demikian juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang mengalami kenaikan sebesar 0,10 poin yaitu dari 0,45 pada keadaan Maret 2015 menjadi 0,55 pada keadaan Maret 2016 (Tabel 4.3). Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan 0,65 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,56. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan 0,12 sementara daerah perdesaan mencapai 0,79. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan

ketimpangan kemiskinan di daerah daerah perkotaan lebih baik daripada perdesaan.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat juga bahwa nilai P_1 untuk daerah perkotaan naik 0,01 poin selama periode Maret 2015 hingga Maret 2016. Beda halnya dengan P_2 yang mengalami penurunan dari 0,16 menjadi 0,12 pada periode yang sama. Sedangkan di daerah perdesaan, baik P_1 dan P_2 mengalami kenaikan sebesar 0,26 dan 0,16 poin.

4.4. Perkembangan Gini Ratio Maret 2016 - Maret 2017

Tabel 4.4. Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2016

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Kota+Desa
Maret 2013	0,443	0,374	0,429
Maret 2014	0,436	0,373	0,425
Maret 2015	0,421	0,380	0,424
Maret 2016	0,422	0,367	0,426

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada Maret 2013 tercatat sebesar 0,429 dan menurun pada Maret 2014 menjadi 0,425. Gini Ratio turun kembali menjadi 0,424 pada Maret 2015. Pada Maret 2016, Gini Ratio tercatat sebesar 0,426.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2015 hingga Maret 2016 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,001 poin. Demikian juga halnya di daerah perdesaan nilai Gini Ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,013 poin pada Maret 2016 dibanding dengan Maret 2015.

V. Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

KEMISKINAN

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P₁, P₂, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	16,9	12,94	2,24	0,54	286 032
2	Bulukumba	33,4	8,15	1,22	0,26	272 703
3	Bantaeng	17,6	9,53	1,30	0,26	217 595
4	Jeneponto	53,9	15,18	3,21	1,01	291 408
5	Takalar	27,1	9,48	1,38	0,34	278 538
6	Gowa	59,5	8,27	1,56	0,46	306 328
7	Sinjai	22,0	9,26	1,67	0,46	231 732
8	Maros	40,1	11,85	2,31	0,69	307 717
9	Pangkajene dan Kepulauan	53,9	16,70	3,59	1,11	251 700
10	Barru	16,1	9,42	1,55	0,37	263 210
11	Bone	75,0	10,12	1,73	0,40	252 392
12	Soppeng	18,9	8,36	0,98	0,19	213 164
13	Wajo	30,1	7,66	1,18	0,32	253 164
14	Sidenreng Rappang	16,0	5,55	0,66	0,13	255 135
15	Pinrang	30,5	8,34	1,66	0,52	234 897
16	Enrekang	27,6	13,82	2,11	0,52	258 472
17	Luwu	48,6	13,89	2,54	0,69	252 549
18	Tana Toraja	28,6	12,46	2,69	0,91	238 838
19	Luwu Utara	41,9	13,87	2,83	0,80	265 822
20	Luwu Timur	19,7	7,18	1,28	0,35	254 957
21	Toraja Utara	34,4	15,19	1,87	0,39	367 325
22	Kota Makassar	63,2	4,38	0,60	0,12	321 094
23	Kota Parepare	8,4	6,08	0,81	0,16	270 508
24	Kota Palopo	14,5	8,58	1,76	0,52	246 727
	Sulawesi Selatan	797,7	9,39	1,69	0,45	248 391

Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P₁, P₂, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,21	13,11	2,19	0,65	296 540
2	Bulukumba	33,25	8,06	1,72	0,52	274 318
3	Bantaeng	17,53	9,51	1,78	0,59	223 408
4	Jeneponto	55,32	15,49	3,25	0,96	302 113
5	Takalar	27,05	9,35	1,34	0,35	286 537
6	Gowa	61,52	8,40	1,59	0,47	316 428
7	Sinjai	22,51	9,41	1,66	0,43	240 245
8	Maros	39,02	11,41	2,46	0,79	336 579
9	Pangkajene dan Kepulauan	52,86	16,22	3,11	0,97	256 549
10	Barru	16,24	9,45	1,71	0,52	280 316
11	Bone	75,09	10,07	1,51	0,31	260 552
12	Soppeng	19,12	8,45	1,73	0,50	220 192
13	Wajo	29,46	7,47	1,12	0,30	258 821
14	Sidenreng Rappang	15,92	5,45	0,98	0,24	271 301
15	Pinrang	31,28	8,48	1,30	0,36	250 163
16	Enrekang	26,98	13,41	2,32	0,64	275 971
17	Luwu	50,58	14,35	2,32	0,61	271 804
18	Tana Toraja	28,42	12,36	2,65	0,98	251 452
19	Luwu Utara	43,75	14,36	2,29	0,60	288 081
20	Luwu Timur	21,08	7,52	1,09	0,23	277 520
21	Toraja Utara	33,02	14,57	3,76	1,34	393 478
22	Kota Makassar	66,78	4,56	0,67	0,16	347 723
23	Kota Parepare	8,02	5,73	0,82	0,19	281 951
24	Kota Palopo	15,02	8,74	1,17	0,28	261 056
Sulawesi Selatan		807,03	9,40	1,83	0,55	270 601

PENDIDIKAN**Tabel 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	36,71	48,68	14,62
2	Bulukumba	38,28	46,50	15,21
3	Bantaeng	63,61	31,60	4,79
4	Jeneponto	64,99	30,17	4,84
5	Takalar	57,95	35,49	6,56
6	Gowa	56,25	33,93	9,83
7	Sinjai	43,36	38,66	17,98
8	Maros	49,70	42,28	8,02
9	Pangkajene dan Kepulauan	43,99	46,65	9,36
10	Barru	50,37	41,58	8,05
11	Bone	42,29	51,10	6,61
12	Soppeng	57,59	33,77	8,64
13	Wajo	58,15	35,67	6,18
14	Sidenreng Rappang	34,88	50,52	14,60
15	Pinrang	45,43	45,37	9,20
16	Enrekang	35,43	52,22	12,34
17	Luwu	34,98	49,02	16,00
18	Tana Toraja	38,86	46,41	14,73
19	Luwu Utara	30,68	49,08	20,24
20	Luwu Timur	30,82	60,32	8,86
21	Toraja Utara	39,60	46,04	14,36
22	Kota Makassar	13,37	49,82	36,81
23	Kota Parepare	37,95	52,53	9,52
24	Kota Palopo	22,07	52,49	25,44
	Sulawesi Selatan	43,23	43,99	12,79

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	46,61	32,82	20,57
2	Bulukumba	38,56	43,10	18,34
3	Bantaeng	59,26	30,11	10,63
4	Jeneponto	46,63	39,28	14,08
5	Takalar	51,27	36,95	11,78
6	Gowa	46,66	37,17	16,17
7	Sinjai	39,22	43,77	17,01
8	Maros	42,26	43,35	14,38
9	Pangkajene dan Kepulauan	39,67	49,32	11,01
10	Barru	41,92	51,10	6,98
11	Bone	39,46	50,43	10,10
12	Soppeng	49,22	40,54	10,24
13	Wajo	52,05	42,84	5,11
14	Sidenreng Rappang	41,23	41,67	17,10
15	Pinrang	37,69	48,17	14,14
16	Enrekang	30,17	45,48	24,35
17	Luwu	28,14	51,01	20,85
18	Tana Toraja	34,15	42,57	23,27
19	Luwu Utara	30,95	53,84	15,21
20	Luwu Timur	26,32	58,67	15,02
21	Toraja Utara	43,85	38,56	17,59
22	Kota Makassar	19,78	44,95	35,27
23	Kota Parepare	36,14	44,70	19,16
24	Kota Palopo	21,52	60,01	18,47
	Sulawesi Selatan	38,82	44,81	16,37

Tabel 5.5. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Selayar	100,00	93,97	100,00	100,00
2	Bulukumba	100,00	97,43	100,00	100,00
3	Bantaeng	100,00	84,26	100,00	68,84
4	Jeneponto	95,25	74,31	100,00	84,93
5	Takalar	100,00	91,67	100,00	73,83
6	Gowa	86,79	74,61	100,00	81,73
7	Sinjai	100,00	95,44	100,00	100,00
8	Maros	100,00	80,03	100,00	84,00
9	Pangkajene dan Kepulauan	98,16	93,55	100,00	78,18
10	Barru	91,58	86,19	96,46	68,48
11	Bone	100,00	91,81	95,81	79,01
12	Soppeng	100,00	97,41	93,21	90,39
13	Wajo	100,00	93,97	95,89	87,28
14	Sidenreng Rappang	100,00	97,91	95,74	100,00
15	Pinrang	100,00	90,33	100,00	84,23
16	Enrekang	100,00	95,17	98,33	93,44
17	Luwu	100,00	95,67	98,61	88,84
18	Tana Toraja	98,51	87,59	100,00	85,82
19	Luwu Utara	99,12	96,49	100,00	100,00
20	Luwu Timur	100,00	100,00	100,00	90,96
21	Toraja Utara	97,51	92,88	95,87	88,53
22	Kota Makassar	100,00	93,23	93,96	100,00
23	Kota Parepare	100,00	96,77	100,00	73,99
24	Kota Palopo	100,00	97,25	100,00	99,72
Sulawesi Selatan		98,14	90,00	98,44	86,94

Tabel 5.6. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Selayar	100,00	96,60	100,00	100,00
2	Bulukumba	100,00	97,78	94,28	95,08
3	Bantaeng	100,00	83,11	100,00	78,47
4	Jeneponto	98,50	87,43	98,18	64,79
5	Takalar	100,00	81,77	94,04	74,37
6	Gowa	95,58	83,46	97,49	92,70
7	Sinjai	100,00	91,29	96,78	92,02
8	Maros	100,00	90,88	100,00	100,00
9	Pangkajene dan Kepulauan	95,80	89,66	97,98	81,92
10	Barru	100,00	85,67	100,00	100,00
11	Bone	96,36	94,09	100,00	84,98
12	Soppeng	97,16	87,66	92,53	100,00
13	Wajo	100,00	82,83	100,00	43,95
14	Sidenreng Rappang	100,00	96,18	100,00	72,31
15	Pinrang	96,09	96,41	93,62	95,23
16	Enrekang	100,00	98,17	100,00	92,64
17	Luwu	98,50	94,44	100,00	87,12
18	Tana Toraja	96,05	89,27	100,00	84,82
19	Luwu Utara	95,50	88,06	97,75	85,78
20	Luwu Timur	95,01	93,53	100,00	93,68
21	Toraja Utara	100,00	88,36	100,00	93,50
22	Kota Makassar	100,00	100,00	100,00	82,62
23	Kota Parepare	100,00	91,91	100,00	100,00
24	Kota Palopo	93,66	94,15	100,00	100,00
	Sulawesi Selatan	97,91	91,11	98,56	86,16

KETENAGAKERJAAN**Tabel 5.7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	39,55	40,90	19,55
2	Bulukumba	49,98	43,81	6,21
3	Bantaeng	34,74	54,09	11,18
4	Jeneponto	33,45	62,25	4,30
5	Takalar	49,68	31,37	18,95
6	Gowa	39,53	50,36	10,11
7	Sinjai	40,99	52,11	6,91
8	Maros	42,54	38,81	18,65
9	Pangkajene dan Kepulauan	45,87	34,54	19,59
10	Barru	57,56	35,69	6,75
11	Bone	38,36	53,96	7,67
12	Soppeng	41,01	41,98	17,01
13	Wajo	42,84	43,41	13,75
14	Sidenreng Rappang	53,46	30,72	15,82
15	Pinrang	48,31	42,16	9,53
16	Enrekang	30,72	65,93	3,35
17	Luwu	43,35	51,20	5,45
18	Tana Toraja	14,94	78,58	6,48
19	Luwu Utara	26,69	62,10	11,21
20	Luwu Timur	43,43	48,31	8,26
21	Toraja Utara	22,77	70,29	6,95
22	Kota Makassar	50,26	21,10	28,64
23	Kota Parepare	59,83	22,07	18,10
24	Kota Palopo	51,41	28,98	19,61
	Sulawesi Selatan	40,56	47,24	12,20

Tabel 5.8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	42,47	39,93	17,60
2	Bulukumba	53,75	31,67	14,58
3	Bantaeng	28,05	62,77	9,18
4	Jeneponto	43,57	42,00	14,44
5	Takalar	45,43	40,70	13,87
6	Gowa	30,60	53,07	16,34
7	Sinjai	31,67	63,24	5,09
8	Maros	39,48	50,51	10,01
9	Pangkajene dan Kepulauan	48,59	27,87	23,54
10	Barru	59,38	30,72	9,91
11	Bone	38,56	57,63	3,81
12	Soppeng	41,43	56,36	2,21
13	Wajo	48,96	30,44	20,60
14	Sidenreng Rappang	56,79	29,37	13,84
15	Pinrang	48,10	38,46	13,44
16	Enrekang	32,71	62,70	4,59
17	Luwu	37,18	48,49	14,33
18	Tana Toraja	16,21	78,28	5,51
19	Luwu Utara	37,18	59,54	3,28
20	Luwu Timur	42,55	51,86	5,59
21	Toraja Utara	18,62	72,83	8,55
22	Kota Makassar	52,65	12,67	34,68
23	Kota Parepare	53,06	18,29	28,66
24	Kota Palopo	47,54	14,86	37,59
	Sulawesi Selatan	41,03	45,07	13,90

Tabel 5.9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	39,55	39,14	21,31
2	Bulukumba	49,98	30,72	19,30
3	Bantaeng	34,74	50,16	15,11
4	Jeneponto	33,45	47,13	19,41
5	Takalar	49,68	20,19	30,12
6	Gowa	39,53	39,51	20,97
7	Sinjai	40,99	53,68	5,33
8	Maros	42,54	34,49	22,97
9	Pangkajene dan Kepulauan	45,87	29,54	24,59
10	Barru	57,56	25,68	16,76
11	Bone	38,36	43,47	18,16
12	Soppeng	41,01	37,23	21,76
13	Wajo	42,84	26,33	30,83
14	Sidenreng Rappang	53,46	20,92	25,61
15	Pinrang	48,31	37,09	14,61
16	Enrekang	30,72	59,12	10,17
17	Luwu	43,35	36,96	19,69
18	Tana Toraja	14,94	72,65	12,41
19	Luwu Utara	26,69	48,96	24,34
20	Luwu Timur	43,43	49,29	7,29
21	Toraja Utara	22,77	61,57	15,67
22	Kota Makassar	50,26	1,01	48,73
23	Kota Parepare	59,83	1,45	38,71
24	Kota Palopo	51,41	15,74	32,85
	Sulawesi Selatan	40,56	37,04	22,39

Tabel 5.10. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	42,47	33,66	23,87
2	Bulukumba	53,75	35,03	11,22
3	Bantaeng	28,05	47,69	24,26
4	Jeneponto	43,57	33,45	22,99
5	Takalar	45,43	36,95	17,62
6	Gowa	30,60	45,54	23,87
7	Sinjai	31,67	62,16	6,17
8	Maros	39,48	33,31	27,21
9	Pangkajene dan Kepulauan	48,59	29,55	21,86
10	Barru	59,38	27,40	13,23
11	Bone	38,56	52,27	9,17
12	Soppeng	41,43	46,57	12,00
13	Wajo	48,96	37,37	13,68
14	Sidenreng Rappang	56,79	20,70	22,50
15	Pinrang	48,10	37,67	14,23
16	Enrekang	32,71	56,25	11,03
17	Luwu	37,18	47,20	15,61
18	Tana Toraja	16,21	78,75	5,04
19	Luwu Utara	37,18	53,90	8,92
20	Luwu Timur	42,55	44,60	12,85
21	Toraja Utara	18,62	61,78	19,60
22	Kota Makassar	52,65	1,14	46,20
23	Kota Parepare	53,06	3,68	43,26
24	Kota Palopo	47,54	10,82	41,63
	Sulawesi Selatan	41,03	39,62	19,35

PENGELUARAN PERKAPITA**Tabel 5.11. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	60,68	62,95	60,97
2	Bulukumba	59,70	61,65	59,86
3	Bantaeng	55,64	64,19	56,46
4	Jeneponto	62,58	69,52	63,63
5	Takalar	59,61	68,30	60,43
6	Gowa	55,86	65,83	56,69
7	Sinjai	60,82	67,50	61,44
8	Maros	53,88	69,03	55,68
9	Pangkajene dan Kepulauan	55,97	66,11	57,67
10	Barru	56,75	67,84	57,80
11	Bone	59,07	65,90	59,76
12	Soppeng	59,31	67,61	60,00
13	Wajo	57,83	69,46	58,72
14	Sidenreng Rappang	58,86	61,66	59,02
15	Pinrang	54,70	66,02	55,64
16	Enrekang	57,86	65,02	58,85
17	Luwu	61,10	66,90	61,90
18	Tana Toraja	58,40	69,16	59,74
19	Luwu Utara	60,26	66,61	61,14
20	Luwu Timur	56,21	67,98	57,05
21	Toraja Utara	63,49	65,82	63,84
22	Kota Makassar	50,15	56,87	50,44
23	Kota Parepare	49,13	60,91	49,85
24	Kota Palopo	53,18	63,49	54,07
	Sulawesi Selatan	56,58	65,71	57,44

Tabel 5.12. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	62,31	59,19	59,72
2	Bulukumba	60,07	56,70	56,97
3	Bantaeng	63,13	56,44	57,08
4	Jeneponto	68,29	62,08	63,04
5	Takalar	66,04	57,16	57,99
6	Gowa	60,69	53,44	54,05
7	Sinjai	61,78	58,11	58,45
8	Maros	59,52	52,02	52,88
9	Pangkajene dan Kepulauan	59,25	53,66	54,57
10	Barru	60,82	53,87	54,53
11	Bone	62,24	55,85	56,50
12	Soppeng	67,22	60,04	60,65
13	Wajo	57,48	54,83	55,03
14	Sidenreng Rappang	61,18	56,22	56,49
15	Pinrang	66,48	55,35	56,30
16	Enrekang	59,88	57,09	57,46
17	Luwu	68,36	60,96	62,02
18	Tana Toraja	58,08	56,35	56,56
19	Luwu Utara	63,27	58,20	58,93
20	Luwu Timur	62,71	52,44	53,21
21	Toraja Utara	60,08	59,71	59,76
22	Kota Makassar	64,41	47,72	48,48
23	Kota Parepare	58,41	50,24	50,71
24	Kota Palopo	63,91	52,78	53,75
	Sulawesi Selatan	62,64	54,57	55,33

KESEHATAN**Tabel 5.13. Persentase Perempuan Berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Alat KB	Balita Yang Telah Diimunisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	64,23	96,71
2	Bulukumba	74,15	71,48
3	Bantaeng	75,41	57,98
4	Jeneponto	68,44	80,11
5	Takalar	74,79	94,98
6	Gowa	61,60	88,14
7	Sinjai	53,89	83,13
8	Maros	76,93	89,44
9	Pangkajene dan Kepulauan	69,77	98,08
10	Barru	49,33	87,08
11	Bone	47,43	98,00
12	Soppeng	38,97	98,00
13	Wajo	60,88	85,89
14	Sidenreng Rappang	46,51	98,00
15	Pinrang	63,64	93,52
16	Enrekang	53,72	97,30
17	Luwu	40,92	94,93
18	Tana Toraja	69,14	89,73
19	Luwu Utara	66,23	97,85
20	Luwu Timur	81,53	88,29
21	Toraja Utara	62,25	90,77
22	Kota Makassar	60,26	77,45
23	Kota Parepare	56,40	93,31
24	Kota Palopo	72,77	86,88
	Sulawesi Selatan	61,49	89,24

FASILITAS PERUMAHAN**Tabel 5.14. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	79,84	49,02
2	Bulukumba	71,20	82,80
3	Bantaeng	82,82	43,37
4	Jeneponto	80,45	45,56
5	Takalar	58,94	63,93
6	Gowa	42,03	82,84
7	Sinjai	47,06	74,31
8	Maros	55,41	61,46
9	Pangkajene dan Kepulauan	40,78	46,93
10	Barru	55,29	77,52
11	Bone	69,51	62,78
12	Soppeng	80,00	80,27
13	Wajo	57,11	71,23
14	Sidenreng Rappang	51,04	50,91
15	Pinrang	47,75	66,76
16	Enrekang	53,14	89,37
17	Luwu	44,26	42,72
18	Tana Toraja	43,10	84,56
19	Luwu Utara	49,89	67,03
20	Luwu Timur	39,96	62,77
21	Toraja Utara	37,96	92,61
22	Kota Makassar	98,00	90,11
23	Kota Parepare	70,89	80,08
24	Kota Palopo	83,50	71,73
	Sulawesi Selatan	59,89	67,22

PROGRAM PEMERINTAH**Tabel 5.15. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-Rata Jumlah Beras Raskin, dan Rata-Rata Harga Pembelian Beras Raskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Ruta Miskin Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	79,46	12,94	1 988
2	Bulukumba	41,01	13,95	1 895
3	Bantaeng	80,98	8,98	1 886
4	Jeneponto	74,43	5,96	2 171
5	Takalar	3,16	15,00	1 659
6	Gowa	20,13	13,92	1 909
7	Sinjai	62,36	14,40	1 843
8	Maros	22,51	15,06	1 882
9	Pangkajene dan Kepulauan	75,17	10,23	1 722
10	Barru	54,94	14,30	1 737
11	Bone	59,07	14,62	1 632
12	Soppeng	32,69	15,00	1 600
13	Wajo	58,02	16,54	1 686
14	Sidenreng Rappang	47,90	15,00	1 688
15	Pinrang	22,49	9,88	1 832
16	Enrekang	41,61	13,61	1 972
17	Luwu	28,46	15,39	1 878
18	Tana Toraja	51,56	15,98	1 860
19	Luwu Utara	48,78	13,48	1 684
20	Luwu Timur	81,47	12,11	1 752
21	Toraja Utara	54,56	15,00	1 681
22	Kota Makassar	29,92	15,00	1 643
23	Kota Parepare	73,26	11,89	1 128
24	Kota Palopo	96,00	10,99	1 655
	Sulawesi Selatan	48,35	12,59	1 799

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H.Bau No. 6 Makassar 90125

Telp. (0411) 854838, Fax. (0411) 851225

Homepage : <http://sulsel.bps.go.id> E-mail : bps7300@bps.go.id

